

LAPORAN PENELITIAN
DINAMIKA ISU SARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
DAN KAITANNYA DENGAN ADMINISTRASI NEGARA

(Ujian Tengah Semester)

Sarah Qurotul Ain
2216041091



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
OKTOBER, 2023

ABSTRACT

By

Sarah Qurotul Ain

This research aims to understand the public's perspective, particularly students, on issues related to SARA (Ethnicity, Religion, Race, and Inter-group Relations) that influence the functioning of the state administration process in Indonesia. Additionally, it seeks to determine the political impact of SARA issues on people's lives. The research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. In this qualitative study, the researcher utilized questionnaires and interviews with three students as informants. SARA issues often serve as triggers for political conflicts, especially in the context of general elections. Intense political competition can lead to tensions between ethnic or religious groups, and in some cases, result in violence or riots. This is one of the challenges faced by Indonesia. The research has limitations in terms of the respondents, with only 20 individuals participating in the questionnaire.

Keyword : SARA. Politic, Conflict.

ABSTRAK

Oleh

Sarah Qurotul Ain

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat, khususnya mahasiswa terhadap SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang memberi pengaruh terhadap jalannya proses administrasi negara di Indonesia dan juga untuk mengetahui dampak politik isu SARA dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan Teknik kuisioner dan wawancara kepada tiga mahasiswa sebagai informan. Isu-isu SARA seringkali menjadi pemicu konflik politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Persaingan politik yang sengit dapat memicu ketegangan antar-grup etnis atau agama, dan bahkan dalam beberapa kasus, berujung pada kekerasan atau kerusuhan. Hal itu merupakan salah satu kesenjangan yang di hadapi oleh Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada responden penelitian, yaitu hanya 20 orang yang mengisi kuisioner yang telah dibuat.

Kata Kunci : SARA, konflik, Politik.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	11
2.3 Definisi Konsep	12
2.4 Kerangka pemikiran	15
BAB III.....	16
METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Tipe Penelitian.....	16
3.2 Fokus Penelitian	18
3.3 Lokasi Penelitian	18
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	18
3.5 Teknik Pengumpulan Data	20
3.6 Teknik Analisis Data	22
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	23
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil	25
4.1.1 Pendidikan dalam dinamika SARA	25
4.1.2 Politik dalam berbagai dinamika isu SARA.....	25
4.1.3. Peranan Mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA.....	26
4.1.4. Dampak dari adanya politik SARA di Indonesia	26
4.1.5 Hambatan dan tantangan yang dihadapi Administrasi Negara dalam menghadapi konflik SARA	27
4.2 Pembahasan.....	27
BAB V	30
SIMPULAN DAN SARAN.....	30
5.1 Simpulan.....	30
5.2 Saran.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanpa disadari, perjalanan peradaban manusia di bumi ini menunjukkan pentingnya administrasi publik dan birokrasi dijalankan dalam berkontribusi untuk pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia di dunia. Perkembangan pesat administrasi publik ini terlihat jelas sekitar tahun 1950 dan mencapai pucuk sekitar tahun 1960 setelah Perang Dunia II dengan berbentuk *Comparative Administration Group* dibawah kepemimpinan Fred Riggs.

Sejak saat itu juga administrasi publik mulai masuk ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu administrasi publik mengalami pergeseran-pergeseran paradigma yang dimana masing-masing paradigma tersebut memiliki perbedaan. Dalam perjalanannya, administrasi publik tidak berjalan mulus, banyak tantangan yang menghambat berjalannya birokrasi khususnya di Indonesia. Akhir-akhir ini Indonesia di ramaikan dengan adanya Politik SARA. Politik SARA salah satu pemicunya adalah Isu-isu identitas: seperti agama, suku, atau ras. SARA merupakan akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita. Dalam konsep SARA terhang pengertian konflik horisontal yang dimotori oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antargolongan (TaufikAMullah, 1997).

Secara spesifik negara Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau yang tersebar dengan berbagai kemajemukannya. Berbagai macam etnis, suku, kepercayaan, budaya dan juga agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Keberagaman tersebut merupakan warisan sejarah yang di miliki Indonesia. Di Indonesia beberapa agama yang diyakini yaitu Agama Islam, Kristen protestan, Kristen katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Yang demikian disadari atau tidak disadari kondisi keberagaman ini menjadi pemicu terjadinya konflik di Indonesia.

Agama-agama tersebut tentunya mengajarkan kebenaran dan kebaikan serta memberi larangan merusak atau melakukan kekerasan dalam hidup manusia dalam kehidupan yang berdampingan dan selalu dalam kebersamaan yang damai. Akan tetapi masih banyak manusia yang tidak memahami kebenaran agama tersebut, sehingga konflik terus bermunculan di Masyarakat dan dapat mengakibatkan bencana yang dapat mengancam sistem administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman dalam realitas kehidupan Sistem Administrasi Negara Indonesia sebagai kajian multidimensional dan persamaan hak sebagai warga negara yang memiliki tugas untuk selalu menyebarkan perdamaian

Dengan beragamnya suku, agama, ras, dan antargolongan di Indonesia tentu akan memicu terjadinya konflik. Namun bangsa Indonesia dan pemimpin negara kita selalu berusaha meredakan konflik yang ada dengan menanamkan ideologi Pancasila. Masyarakat Indonesia yang multikultural hanya perlu memupuk dan memelihara hal itu sehingga dapat memperkaya budaya yang dimiliki bangsa dan juga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Persatuan dan persatuan bangsa Indonesia semakin tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Dahulu kala kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia mempunyai arti yang berbeda-beda sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa untuk meraih keberkahan dari kesatuan dan orisinalitas inilah bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah, membangun kemauan bangsa, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kemerdekaan dengan upaya pembangunan negara. Meskipun masyarakat Indonesia namun terdapat keberagaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat masih menjadi keluarga besar Indonesia dibawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu prinsip yang mendasari perspektif administrasi negara terhadap keberagaman di negara kita adalah asas Bhineka Tunggal Ika, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Ini adalah konsep yang mendorong persatuan dalam keberagaman, dimana semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan.

Adanya kenyataan bahwa Indonesia mempunyai berbagai keragaman di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multikulturalisme sebagai salah satu model pendidikan di masa mendatang. Menurut el-Mahady (2004) dikatakan bahwa: ”Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural.” Ia juga mengatakan bahwa multikulturalitas tersebut mendorong kebutuhan mendesak untuk mengkonstruksikan kembali budaya bangsa yang dapat menjadi *“integrating force”* yang bisa mengikat seluruh keragaman etnis, suku bangsa dan budaya tersebut.

Kondisi realitas masyarakat Indonesia sekarang ini masih ada anggapan dari sebagian kelompok masyarakat bahwa perbedaan itu adalah musuh yang harus dikalahkan, perbedaan itu adalah suatu ancaman yang harus dihilangkan. Kelihatannya terlalu berlebihan, keberagaman suku, agama, budaya, ras dan antar golongan bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa. Tetapi justru perbedaan itu adalah jalan menuju pengintegrasian bagi bangsa Indonesia. Artinya, kondisi masyarakat yang sangat multikultural itu bisa mendorong masyarakat untuk secara otomatis melakukan pengintegrasian secara menyeluruh.

Administrasi negara Indonesia harus menerapkan kebijakan multikulturalisme yang menghargai dan mendukung keberagaman, termasuk juga perlindungan terhadap kaum minoritas, promosi toleransi, serta memperlakukan semua warga negara dengan setara dan sama rata. Administrasi negara juga harus proaktif terhadap penyelesaian masalah terkait SARA dengan cara adil dan damai.

Atas keberagaman ini, administrasi negara juga memiliki perspektif yang penting karna negara Indonesia secara konstitusional diakui sebagai negara Pancasila, dimana Pancasila menganut prinsip-prinsip inklusivitas dan juga keragaman. Bukan hanya sekedar prinsip dan nilai tetapi juga sebagai landasan ideologis yang mengakomodasikan keberagaman dan memberikan kerangka kerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

Di Indonesia sendiri, awal mula terjadinya SARA memiliki sejarah yang Panjang, yang melibatkan banyak faktor. Sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, agama, dan etnis yang kaya, Indonesia memiliki sejarah konflik yang beragam pula. *Masa pertama* yaitu era pra-kemerdekaan terjadi konflik suku yang melibatkan beberapa kerajaan dan sultanat yang menguasai berbagai wilayah, sehingga menimbulkan konflik antar suku yang saling bersaing untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Selain konflik suku, terdapat juga konflik agama di era ini, selama masa penjajahan, banyak agama-agama yang masuk ke Indonesia seperti islam, Kristen dann hindu yang dibawa para penjajah yang terkadang memicu ketegangan antara agama. *Masa kedua* yaitu pada masa kemerdekaan terjadi konflik nasionalis dengan kaum kolonial yang menyebabkan konflik bersenjata. konflik ideologi juga terjadi di masa ini, terdapat banyak perbedaan ideologi di kalangan pejuang kemerdekaan, seperti perbedaan antara nasionalis, islamis, dan komunis. Hal ini yang memicu konflik

ideologi terjadi. *Masa ketiga* yaitu di era kemerdekaan terjadi konflik etnis yang terjadi dan terkadang muncul karena perbedaan budaya, Bahasa dan sejarah. Konflik agama juga terjadi di masa ini. *Masa keempat* yaitu pada masa orde baru, pada masa ini banyak penindasan terhadap kelompok kaum minoritas. *Masa kelima* yaitu masa reformasi dan pasca orde baru, di masa ini konflik politik mulai terjadi yaitu setelah jatuhnya rezim Suharto, muncul konflik politik antar golongan yang berbeda yang berupaya mempengaruhi arah politik Indonesia. *Masa keenam* yaitu pada zaman kontemporer terjadi konflik Papua, konflik yang berlarut-larut di provinsi tersebut antara kaum separatis dan pemerintah Indonesia. Konflik radikalisme juga terjadi di masa ini, dimana ancaman teroris dan radikalisme agama terus ada, meskipun ada perlawanan keras dari pemerintah.

Konflik-konflik yang terjadi sering disebabkan karena persaingan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan yang paling utama adalah perbedaan ideologi. Akan tetapi walaupun banyak konflik yang terjadi di Indonesia, Indonesia juga memiliki banyak toleransi dan juga kerukunan antar etnis, agama, dan budaya. pada sudut lain (berdasarkan temuan-temuan historis) SARA justru sebagai arena pemberdayaan dan demokrasi. Indonesia penduduknya saat ini kurang lebih 200 juta orang dan terdiri dari multi etnis (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian) di mana masing-masing masih dibagi lagi ke dalam sub-sub etnis seperti Sunda, Padang, Jawa, Amungme, dll. Elemen-elemen dalam SARA tidak selalu terpisah secara kaku tetapi ada kemungkinan terjadi apa yang oleh seorang sosiolog yang bernama Peter Blau (1964) dinamakan *cross cutting affiliation*. Misalnya, ada orang-orang yang berbeda ditinjau dari etnis tetapi disatukan dalam agama, ekonomi, dan kepentingan yang sama. Dari sisi etnis Batak dan Cina berbeda tetapi kadang disatukan karena mereka pemeluk agama Protestan dan sama-sama berdagang. Selain itu masih banyak lagi kelompok-kelompok kepentingan yang berkembang dalam masyarakat dari sekedar untuk reuni hingga kelompok strategis yang memiliki interest mempertahankan status quo (kondisi yang sedang berjalan saat ini). Semua elemen itu dapat berpeluang sebagai konflik sekaligus kekuatan integratif.

Politisasi SARA pernah menjadi ancaman bagi pemilu. Dalam sebuah penelitian oleh Y. S. Dewi dan R. Hartono (2019), mereka menemukan bahwa politisasi SARA dapat terjadi karena adanya kepentingan politik dari elit politik yang ingin mempertahankan kekuasaan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Politik identitas dalam pemilihan umum, seperti politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) telah menjadi topik yang cukup populer di kalangan akademisi dan praktisi politik di Indonesia. Menurut Azizah (2019), politisasi SARA merupakan salah satu bentuk politik identitas yang digunakan oleh elit politik untuk memenangkan pemilihan umum dengan memanfaatkan perbedaan-perbedaan identitas sosial yang ada di masyarakat. Untuk mencegah hal itu, penelitian menyarankan beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti pengawasan dari Lembaga pemilu, dan melakukan sosialisasi yang intensif tentang bahaya politisasi SARA. Dalam sebuah penelitian oleh M. Adi dan D. Wahyudi (2020), mereka menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menghindari politisasi SARA dalam pemilu cenderung lebih mampu memilih dengan bijak dan rasional. Secara keseluruhan, pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu merupakan isu penting yang memerlukan perhatian dan upaya yang serius dari semua pihak terkait. Upaya pencegahan politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melakukan sosialisasi yang intensif dan edukasi tentang bahaya dari kedua praktik tersebut.

Dengan memahami realitas sejarah sebagaimana dikemukakan di atas, ideologi dan sikap dalam memahami SARA harus diubah, terutama terkait ideologi SARA. sebagai sumber perpecahan menjadi SARA sebagai kekuatan yang memberdayakan dan sosial demokrasi. tetapi inversi penpekitive saja tidak cukup. Dibutuhkan politik dan infrastruktur yang memadai dan mendukung proses ini. Salah satu solusinya adalah dengan menempatkan peran negara sebagai fasilitator, pemberi energi dan menstabilkan kekuatan-kekuatan yang ada pada komponen SARA. tentu, dalam setiap komponen SARA masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Pada tahap inilah negara berupaya menjembatani kesenjangan tersebut atau menanggapi kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut. Tetapi tuntutan itu hanya dapat dicapai jika negara benar-benar terlibat dengan rakyat agar setiap kebijakan yang dibuat selalu bisa mewakili rakyat. Dengan kata lain peran tersebut hanya mungkin terjadi di negara dengan sistem politik demokratis seperti Indonesia. Di negara yang monolitik, realitas SARA tentu saja cenderung terabaikan. hanya untuk integritas rezim, melalui kekuasaan dominan atau bahkan faktor agama di seleksi bersama dan depolitisasi. Contohnya agama tidak dapat digunakan untuk tujuan politik, namun pada nyatanya

tidak jarang digunakan oleh otoritas agama sebagai alat untuk memobilisasi rakyat demi kepentingan rezim. Sementara itu, politisasi SARA dapat dihindari dengan memperkuat nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan persatuan dalam masyarakat. Partai politik dan calon yang berkompetisi dalam pemilu harus menekankan pada platform dan program kerja, serta menghindari isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat berdasarkan agama, suku, dan ras. KPU juga dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi politisasi SARA dengan mengeluarkan aturan dan pedoman yang jelas dan tegas. Dalam upaya mencegah politisasi SARA dalam pemilu serentak, diperlukan partisipasi dan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan menjaga integritas dan keadilan pemilu, proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh rakyat.

Perspektif yang memahami SARA sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat mempunyai sifat teori retrograde teoritis dalam pemikiran Peter Berger dan Richard Neuhauss (1977) tentang “struktur mediasi” atau peran lembaga mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi. Mereka sepakat bahwa lembaga mediasi dapat mencakup kelompok lingkungan, agama, etnis, keluarga, atau ras, dan kelompok swadaya (termasuk kelompok kepentingan) dapat digunakan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi realitas makro atau kebijakan publik. Individu akan merasa tidak berdaya untuk mengungkapkan aspirasi jika menampilkan dirinya sebagai individu di hadapan negara dan kebijakan objektifnya. Mereka akan merasa lebih berdaya jika mereka menyalurkan kepentingannya melalui lembaga mediasi karena dalam lembaga tersebut individualitas diakui atau masih diakui dan masih ada pengakuan atas identitas pribadi, sementara realitas publik sangat impersonal. Berawal dari pola pikir seperti itu, unsur SARA juga merupakan perantara yang dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan dalam kerangka demokratisasi politik.

Terbukti jelas bahwa Lembaga mediasi bermanfaat untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam konteks kemajemukan dan demokrasi. Banyak orang pribumi pada masa penjajahan Hindia Belanda yang menggunakan Lembaga mediasi dalam bentuk SARA, misal etnis, sebagai sarana penyaluran aspirasi politik. Secara individual mereka tidak mampu menghadapi kebijakan pemerintah kolonial maka mereka mempergunakan etnis sebagai alat perjuangan. Sebagai contoh pada masa kolonial pemuda-pemuda Nusantara berluang le*at media etnis dengan membentuk Jong Java,

Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, dll. Mediasi agama juga digunakan oleh pedagang-pedagang Islam yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah kolonial dengan memberi konsesi pada pedagang Cina maka mereka mendirikan Serikat dagang Islam.

Peran Administrasi negara dalam hal ini kaitannya dengan keragaman SARA di Indonesia. Pemerintah harus melakukan tatanan pemerintahan yang baik dimana hal itu menjadi landasan pembangunan dan kebijakan di negara yang multikultural ini. Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat diminimalkan, dipecahkan dan juga dipulihkannya segala bidang dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Disadari, dalam mewujudkan tata pemerintahan membutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya yang didukung dari segala pihak dan dilakukan secara terus. Selain itu aparaturnya, pihak swasta dan masyarakat harus bersatu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Erat kaitannya dengan prinsip yang sudah ada sebelumnya yaitu *Good Governance*. *Good Governance* sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “Governance” adalah “kepemerintahan”. Robert Charlick dalam Pandji Santosa (2008:130) juga mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Sedangkan menurut UNDP (United National Development Planning), *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu kesejahteraan rakyat (*economic governance*), proses pengambilan keputusan (*political governance*), tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*) (Prasetyo, 2009). Dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang memegang solidaritas dan tanggung jawab yang kuat, juga efisien dan efektif dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya alam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Perwujudan kemajemukan masyarakat Indonesia tidak hanya terletak pada cita-cita semata, namun juga pada kenyataan sosial politik keseharian yang diimpikan setiap warga negara, yang memerlukan berbagai bentuk tuntutan. Tuntutan tersebut berupa pengakuan substansial dan resmi, baik dari sisi kekuasaan maupun dari sisi masyarakat, serta kelompok sosial, politik, dan budaya, bahwa konsep dan realitas SARA mewakili energi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat majemuk dan demokratis. Oleh karena itu, syarat-syarat tertentu yang mutlak harus dipenuhi agar pluralisme ingin tercapai. Pertama, perlu diperoleh opini politik dari para penguasa yang serius dan tulus dalam membangun struktur metapolitik dan apolitis yang mengakui keberadaan pluralisme. Kedua, masyarakat dan kelompok serta golongan mana pun mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam debat atau diskusi publik mengenai SARA tanpa harus memaksakan rasa identitas negara pada masyarakat sipil. ketiga Semua pihak harus memahami bahwa SARA selain berpeluang menimbulkan konflik (yang cenderung terjadi dalam lingkungan politik yang monolitik), juga dapat menjadi energi untuk mencapai pemberdayaan atau demokrasi (yang cenderung terjadi dalam iklim politik liberal).

SARA dipahami sebagai energi yang mengandung kekuatan konflik tanpa mempertimbangkan SARA sebagai potensi demokrasi. Visi pluralisme dalam arti substantif terdapat pada ungkapan latin yaitu “E Pluribus Unum.” Ungkapan ini mengandung arti pengakuan terhadap pluralisme atau masyarakat cenderung mencegah tindakan politik otoriter. Yang dilakukan oleh satu kelompok berupa rezim politik, kelompok kepentingan, suku, agama, dan lain-lain. Visi seperti ini, jika diterapkan dalam konteks politik tertentu, akan membuat masyarakat dan mekanisme zero-sum game karena kemenangan bukan hanya milik satu kelompok tetapi milik semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi politik.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan good governance diperlukan sebuah etika untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik, segala bentuk konflik termasuk konflik SARA dapat menyebabkan uruknya pelayanan publik. Etika dalam administrasi publik dipandang sebagai standar/norma yang menentukan kualitas tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Etika menurut Bertens (1977) “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh

suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat melihat SARA dalam memberi pengaruh terhadap administrasi Negara di Indonesia?
2. Apa dampak dari politik isu SARA dalam kehidupan sehari-hari?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat, khususnya mahasiswa terhadap SARA yang memberi pengaruh terhadap jalannya proses administrasi negara di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak politik isu SARA dalam kehidupan masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Rendi Krisdianta (2021), mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam ujian skripsinya ia menuliskan sebuah hasil penelitian yang berjudul *“Respon Mahasiswa Komunikasi Dan Penyiaran Islam Terhadap Penyebaran Informasi Mengandung Unsur SARA Di Media Sosial Instagram”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa Komunikasi dan penyiaran Islam terhadap postingan SARA di media sosial Instagram. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung yang aktif menggunakan Instagram. Sampel penelitian ditentukan secara non random sampling, dimana peneliti memilih sampel dari populasi melalui kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) postingan SARA di media sosial Instagram ternyata banyak dijumpai dan berisi ujaran kebencian yang dapat memecah belah umat. Mahasiswa KPI memberikan tanggapan bahwasannya mereka tidak setuju dan tidak menyukai adanya konten dakwah yang mengandung unsur sara di Instagram. (2) sebagian informan memilih untuk mengabaikan postingan tersebut, sebagian lagi memilih untuk crosscheck kebenarannya, serta adapula yang melaporkan sebuah postingan yang dianggap mengganggu. (3) postingan SARA memberikan dampak positif kepada mahasiswa untuk selalu berhati-hati dalam menyaring informasi, mengakses konten-konten dakwah yang ada di media sosial. Dampak negatifnya lebih banyak yaitu dapat menimbulkan perpecahan antara satu dan lainnya, karena unsur sara juga dikategorikan sebagai rasisme. Serta yang paling ditakutkan adalah yang melihat dan mendengarkan mengikuti perkataan Da'i tersebut karena menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar..

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh M Khoiruzadid Taqwa, Riki Purwanto, Yoga Putra A., Yonanda Sukma W., Nadia Tresna Raisya, Wahyu Dewi Fatmala, Nur Hidayah, Rosseta Septia Menawati, Khalis Asyifan (2019) yang berjudul *“Analisis Perspektif Mahasiswa Dalam Menyikapi Isu SARA Menjelang Pilpres 2019”*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis, bentuk isu SARA, perspektif dan upaya mahasiswa UNS dalam menyikapi isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres

2019, serta harapannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana mahasiswa Universitas Sebelas Maret dari berbagai angkatan sebagai informan utama program studi dan fakultas di Universitas Sebelas Maret yang terdiri dari 20 informan, yaitu 4 informan dari FISIP (A1,A2,A3, dan A4), 2 informan dari FK (B1 dan B2), 3 informan dari FH (C1,C2, dan C3), 3 informan dari FEB (D1,D2, dan D3), 3 informan dari FKIP (E1,E2, dan E3), 3 informan dari FP (F1, F2, dan F3), serta 2 informan dari FT (G1 dan G2). Adapun untuk validasi data diperoleh dari 2 narasumber yaitu IA dan S pengamat politik dari FISIP UNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019 yaitu isu agama, yang diketahui dari media sosial dan media lainnya. Sebagai agen perubahan, mahasiswa berpandangan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu menanggapi isu-isu yang tidak sehat dan dapat membuat perpecahan masyarakat, namun mewujudkannya dalam ide dan solusi. Media hendaknya tidak memihak salah satu calon, serta tidak ada money politic dalam Pilpres 2019 yang dapat menyebabkan peluang korupsi semakin besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pemuda dan mahasiswa tentang seputar pemilihan umum, legislatif harus lebih aktif, pencerdasan mengenai hoax dan menolak penyebaran isu yang tidak sehat.

Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Yolanda Pinandita (2020), seorang mahasiswa Universitas 17 Agustus, dalam ujian skripsinya ia menuliskan sebuah hasil penelitian berjudul *“Komunikasi Tokoh Agama Dalam Menepis Isu SARA Secara Agama di Desa Balun Pancasila Kabupaten Lamongan”*. Penelitian ini disusun dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan tokoh agama sebagai komunikator dalam menepis isu SARA secara agama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh tokoh agama di Desa Balun dalam menepis isu SARA dengan memberikan sosialisasi mengenai SARA secara agama secara bertahap dalam acara keagamaan dan para tokoh agama menghimbau kepada masyarakat untuk saling membantu satu sama lain agar dapat menghapus rasa kesenjangan antar umat beragama.

2.2 Landasan Teori

1. Teori Multi Budaya

Menurut Najwan dari keaneragaman budaya, etnis, agama dan multi golongan ini dari suatu sisi secara teori multi budaya merupakan potensi budaya yang dapat mecerminkan baangsa yang besar, akan tetapi dari sisi yang lain dapat berpotensi memunculkan masalah yang bisa mengancam integrase karena konflik antar budaya biasanya memunculkan pertikaian antar etnis, antar agama, ras dan antar golongan (SARA) yang bersifat sensitive dan rapuh yang menjurus kearah disintegrasi bangsa Indonesia.

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana- sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Kalr Marx Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional.

3. Teori Identitas Sosial

Teori identitas sosial pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Henri Tajfel. Identitas sosial merupakan pengetahuan bahwasannya seseorang milik suatu lingkungan atau kelompok tertentu (Hogg & Abrams, 1998). Teori identitas sosial menyatakan bahwa dengan adanya identitas mampu menggolongkan anggota ke dalam kelompok. Tajfel & Turner (1979) menyatakan bahwa identitas sosial seseorang ditentukan dari kelompok mana ia tergabung. Sehingga seseorang akan termotivasi untuk bergabung dengan kelompok yang dianggap menarik dan dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang bergabung.

2.3 Definisi Konsep

1. Politik Identitas

Istilah politik identitas dalam penggunaan secara umum mengacu pada kecenderungan orang berbagi identitas ras, agama, etnis, sosial, atau budaya tertentu untuk membentuk aliansi politik yang eksklusif, daripada terlibat dalam politik partai

tradisional yang berbasis luas, atau mempromosikan kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan kelompok politik yang lebih besar. Sebagaimana dikemukakan Joseph Klein, politik identitas adalah kecenderungan orang-orang dari ras, agama, jenis kelamin, atau etnis tersebut tanpa kepedulian atau perhatian pada atau kelompok kolektif yang lebih besar. Menurut Richard Thomson Ford, masalah politik identitas sebenarnya bukan hal yang baru sebab semua politik melibatkan unsur identitas dan semua identitas bersifat politik. Akan tetapi, ketika kita menggunakan frasa “politik identitas” (politics of identity atau identity politics) tentu mengacu pada sesuatu yang lebih spesifik atau bermakna khusus.

Politik identitas menunjukkan orientasi politik yang dibangun di sekitar identitas sosial (yang sudah ada sebelumnya). Dengan kata lain, identitas sudah ada pada diri seseorang sebelum masuk ke arena, proses, atau aktivitas politik. Menurut Vasikili Neofotistos, politik identitas, juga biasa disebut sebagai politik berbasis identitas (identity-based-politics), merupakan frasa yang banyak digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penyebaran kategori identitas sebagai alat untuk membongkar klaim-klaim politik, mempromosikan politik-politik, atau merangsang dan mengorientasikan tindakan sosial dan politik. Semua ini dilakukan biasanya dalam konteks ketidaksetaraan (inequality) atau ketidakadilan (injustice) yang lebih besar dan dengan tujuan menegaskan keunikan dan kepemilikan kelompok dan memperoleh kekuasaan dan pengakuan dari kelompok lain (yang lebih mapan). Pandangan Vasikili Neofotistos⁴ tersebut didukung pendapat Calrissa Rile Hayward dan Ron Watson yang menegaskan bahwa politik identitas adalah politik dimana ketika orang-orang terlibat, bergerak, mendefinisikan pengalaman mereka, masalah politik mereka, dan tujuan mereka berdasarkan kebaikan kelompok identitas.

2. Kampanye Politik

Kampanye politik menurut Kotler dan Roberto dalam Cangara yaitu: “Campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior.” Kampanye adalah suatu usaha yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memengaruhi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi, atau membuang ide, sikap, dan perilaku tertentu.

Kampanye politik bersifat product-based atau product-driven. Kampanye politik dilaksanakan ketika jadwal pemilihan umum telah ditetapkan serta kandidat telah ditentukan dan disahkan keikutsertaannya sebagai kontestan pemilihan umum. Dalam praktiknya, strategi dari penyusunan pesan dalam kampanye politik sangat tergantung dari rancangan peran spin doctor. Spin doctor atau dalam istilah lain public relation politic (PR politik) bertugas membangun citra kandidat yang diusung dan memberi kesan negatif saingannya. PR politik adalah individu yang memiliki kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa, dan menguasai media sekaligus sebagai konseptor politik yang bertujuan memengaruhi. Di Indonesia, spin doctor atau yang biasa juga disebut sebagai manajer kampanye adalah orang yang menentukan pengarahannya opini publik dalam pencitraan kandidat.

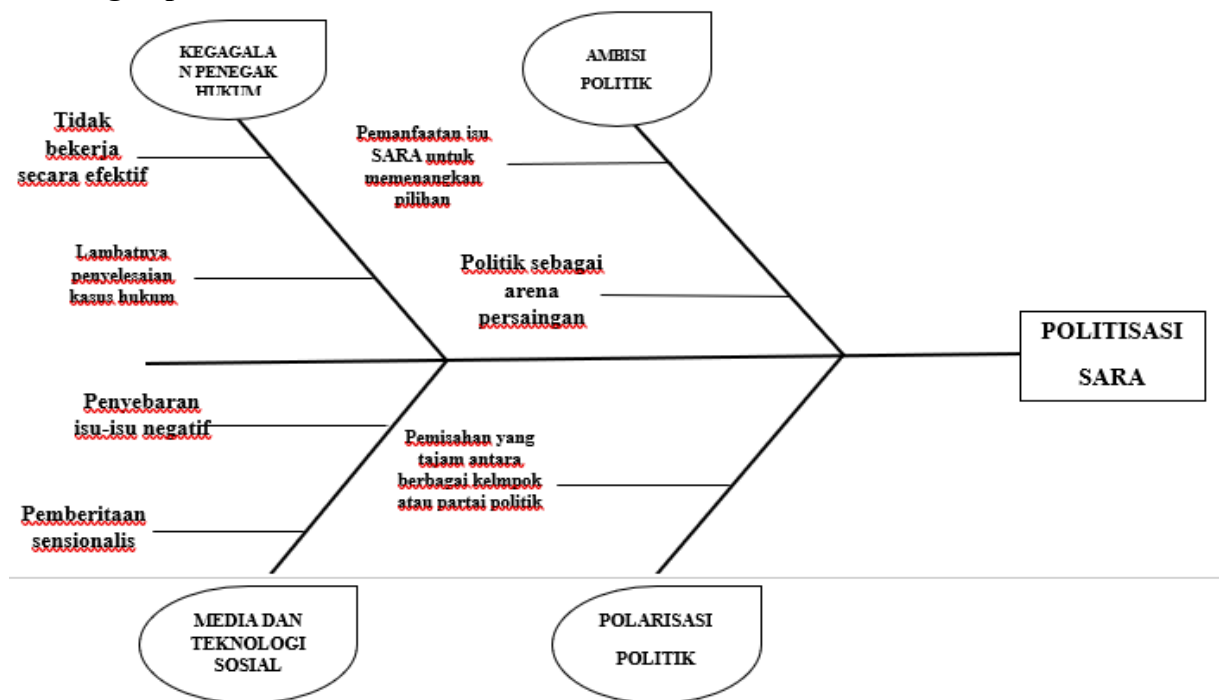
3. Elite Politik

Elite politik merupakan individu yang menduduki posisi komando di lembaga utama dalam masyarakat. Elite politik dapat mengambil keputusan yang membawa konsekuensi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Elite politik menunjukkan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati setiap keuntungan dari kekuasaan. Kekuasaan yang mereka miliki tidak berasal dari komunitasnya atau posisi ekonomi, tetapi dari organisasinya yang berhubungan dengan kekuasaan publik negara. Putnam mengartikan kekuasaan sebagai probabilitas untuk memengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara atau probabilitas untuk memengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif.

Dalam kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Dalam hal itu, Putnam menggambarannya dalam sebuah pyramid dengan stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan, lapisan ini Sebagian besar terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan resmi utama. Lapisan kedua adalah kaum berpengaruh yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka adalah yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan untuk suatu kepentingan dan pendapatnya akan diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Lapisan kedua terdiri dari para birokrat, tuan tanah, industrialis, bankir, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi. Lapisan ketiga terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah, contohnya ialah anggota partai, birokrat tingkat menengah, editor surat kabar atau para penulis. Lapisan ini disebut sebagai aktivis yang jumlahnya lebih banyak daripada kaum berpengaruh. Lapisan keempat terdiri

dari orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti tontonan yang sangat menarik. Orang-orang yang disebut dengan publik penikmat politik (attentive public) ini berbeda dengan sebagian besar warga negara akibat luar biasa besarnya perhatian yang mereka berikan terhadap masalah antara pemerintahan dengan kemasyarakatan. Seperti mengetahui pemain terkemuka dalam permainan politik sekalipun tidak melihat “angka kemenangan” yang diperleh masing-masing pemain, dan mereka hanya mendiskusikan jalannya permainan dan strateginya serta jarang sekali terjun ke lapangan. Lapisan kelima adalah kaum pemilih (voters), dimana kaum ini memiliki satu sumber politik kolektif penting, yaitu jumlahnya sangat besar, tetapi sebagai individu mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali. Dan lapisan keenam ialah mereka yang dalam pengertian politik sebagai objek politik dan bukan aktor melainkan non-partisan. Mereka tidak berafiliasi kepada siapapun dan juga tidak memiliki pengaruh politik.

2.4 Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebabmberguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011: 299). Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, Hutter & Bailey, 2020; Sarmanu, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). (Sigiyono, 2009:8) Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2016:13). Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sisal. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedurstatistik atau metode kuantitatifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistic untuk memahami fenomena tertentu. Kualitatif berusaha untuk mendapat pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti diantaranya adalah fenomenology, etnografi, hermeneutik, grounded

theory, naratif/historis, dan studi kasus. (1) fenomenology; pendekatan ini berusaha mengungkapkan, mempelajari serta memahami fenomena dan konteksnya yang khas dan unik dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Martin Heidegger mengembangkan pendekatan ini bertujuan untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia, mencari hakikat atau esensi dari pengalaman dan sasarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagaimana disadari. (2) etnografi; fokus pendekatan ini adalah pada riset sosial (budaya dan Bahasa). (3) hermeneutic; “Hermeneutics as the methodology of interpretation can provide guidance for solving problems of interpretation of human actions, texts and other meaningful material by offering a toolbox based on solid empirical evidence” (Ramberg & Gjesdal: 2009). Penafsiran untuk mengerti dan memahami arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan, hermeneutika juga mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap dengan jelas dan benar, asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris. (4) grounded theory; merupakan pendekatan untuk menganalisis yang terkait data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan teori induktif mengenai area substantif. (5) naratif/historis; sebuah metode untuk membantu memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dan mengacu pada narasi yang didengarkan. (6) studi kasus; pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan/informasi secara mendalam tentang hal tersebut (Baxter & Jack: 2008). Fenomena yang dipilih biasanya disebut dengan kasus, artinya hal yang actual (real-life events), sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat.

Metode penelitian yang disebutkan di atas memberi kerangka kerja yang umum untuk mempelajari dinamika isu SARA. Namun, penting untuk disadari bahwa setiap penelitian memiliki konteks yang unik, dan peneliti harus memilih metode yang sesuai dengan tujuan dan lingkungan penelitian mereka. Dengan metode penelitian yang tepat, kita dapat menghasilkan wawasan yang berharga dan memberikan kontribusi pada upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena adanya SARA yang beragam di Indonesia. Selanjutnya, dalam hal ini akan digunakan metode studi kasus guna memberi pemahaman lebih rinci mengenai fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis secara rinci dengan melibatkan

pengumpulan data dengan wawancara pada sejumlah individu dan menganalisis data-data sekunder yang ada. Pilihan metode penelitian yang tepat akan tergantung pada tujuan penelitian, sumberdaya yang tersedia, dan konteks penelitian yang spesifik. Menggabungkan beberapa metode juga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini meliputi:

1. Persepsi masyarakat tentang keadilan SARA
2. Bagaimana Pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesetaraan dan mengatasi isu-isu SARA dalam administrasi negara

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Keduanya akan dijelaskan dibawah ini, namun peneliti akan lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam penelitian ini.

1. Data kualitatif

Data kualitatif Data kualitatif didefinisikan sebagai data yang mendekati dan mencirikan, memberikan ciri atau karakter. Ciri data ini adalah dapat diamati dan dicatat. Tipe data ini bersifat non-numerik. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa. Data kualitatif dalam statistik disebut juga sebagai data kategorikal – yakni dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari suatu hal atau fenomena.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Lalu kemudian diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis engan system statistik.

Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dilihat dari definisinya, data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data primer biasanya tersedia dalam bentuk yang belum diolah. Karena data ini langsung didapatkan dari sumber utamanya, bentuk datanya masih benar-benar mentah dan belum ada penyempurnaan sama sekali. Namun, data primer selalu spesifik dalam menyesuaikan kebutuhan penelitian. Untuk membuktikan keaslian data primer adalah dengan melihat kualitas dari hasil akhir penelitian, jika kualitas data asli, maka kualitas hasil juga akan bagus. Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Sedangkan data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. Dalam proses pengumpulannya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung. Sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini bisa kamu dapatkan dengan beberapa cara seperti melalui kuesioner, wawancara langsung, atau survei. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data primer pun lebih lama dibandingkan data sekunder. Seperti contoh, peneliti perlu mengamati subjek penelitian selama beberapa waktu sambil mencatat data penting ketika mengamati perilaku sekelompok orang atau spesies tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer, dengan mahasiswa sebagai informan utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus

penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. bentuk datanya sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer. proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya. Berbeda sedikit dari pengertian data primer, data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Dalam mendapatkannya, data sekunder membutuhkan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan data primer. Data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data yang sudah ada dari Lembaga pemerintah terkait Lembaga-lembaga administrasi negara dalam menghadapi isu SARA ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif (belum pasti atau dapat berubah) karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang mau diperoleh. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti biasanya diibaratkan sebagai *bricoleur*. Menurut Denzin dan Lincoln hal itu berarti: *the qualitative research as bricoleur uses the tools of historical or methodological trade, deploying whatever strategies, methods, or empirical materials as are at hand*” Dengan kata lain, selayaknya penelitian kualitatif itu merupakan: a kind of professional doing it yourself person, yang mengimplikasikan keputusan-keputusan profesional penelitian sesuai dengan konteks permasalahan, fakta sasaran penelitian, dan target hasil yang ingin dicapai (Denzin & Lincoln:1994). Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara.

Wawancara merupakan metode paling umum yang sering digunakan oleh peneliti. Wawancara merupakan cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah diarahkan oleh beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti. wawancara yang tidak terstruktur merupakan wawancara yang dimana peneliti hanya berfokus pada pusat permasalahan tanpa terikat format tertentu. Pada wawancara ini, sebagai informan yaitu beberapa mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara.

2. Kuisisioner

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi dari responden. Dengan memberikan daftar pertanyaan, jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikumpulkan sebagai data, kemudian data tersebut diolah dan disimpulkan menjadi hasil penelitian. Salah satu manfaat dari kuisisioner yaitu untuk menghasilkan data dan informasi dengan validitas yang tinggi. terdapat tiga jenis kuisisioner yaitu *pertama* kuisisioner terbuka, kuisisioner terbuka adalah kuisisioner dengan jenis pertanyaan uraian sehingga memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban sesuai yang ia inginkan. *Kedua* kuisisioner tertutup yaitu pertanyaan yang diberikan ialah berupa pilihan ganda atau checklist, dengan begitu responden hanya dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tersedia. *Ketiga* kuisisioner campuran yaitu perpaduan antara kuisisioner terbuka dan tertutup. Selain berguna untuk memperoleh informasi mendalam, metode tersebut juga sekaligus memberikan sejumlah data berupa angka.

Pada penelitian ini, kuisisioner ditujukan pada 10 orang mahasiswa sebagai responden. Kuisisioner ini disusun secara tertutup yaitu dengan memberi jawaban berupa pilihan ganda untuk memudahkan pengisian kuisisioner ini.

3. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku atau majalah, yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah untuk menganalisis data kualitatif yaitu :

- Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam suatu analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkan sesuai data yang diteliti.
- Display data (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- Penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan pengkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.

Pada penelitian ini, analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu:

- a) Pengumpulan data : data-data pada penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuisioner kepada sejumlah mahasiswa Administrasi Negara Universitas Lampung,

sedangkan sumber sekunder diperoleh dari beberapa e-bok penelitian atau analisis suatu masalah oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

- b) Reduksi data : pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi penting yang memuat data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai Dinamika Isu Sara Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia dan Kaitannya Dengan Administrasi Negara.
- a) Penyajian data : bentuk penyajian data akan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- b) Penarikan kesimpulan : bentuk penyajian ini dapat memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja pada penelitian Dinamika Isu Sara Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia dan Kaitannya Dengan Administrasi Negara.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Setelah data penelitian dikumpulkan, maka dilakukan pengujian keabsahan data untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar. Adapun unsur-unsur yang dinilai adalah lama penelitian, proses observasi yang berlangsung, serta proses pelaporan data yang kita peroleh dari berbagai informan penelitian yang kita sebut dengan triangulasi data. Membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan melakukan *check* and *recheck*. Beberapa cara untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian yaitu :

1. Memperpanjang masa pengamatan
2. Pengamatan yang terus menerus
3. Triangulasi
4. Transferabilitas
5. Dependability
6. Konfirmabilitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan cara :

- 1) Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan juga waktu. Triangulasi sumber dilakukan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Selain wawancara, peneliti juga menyebarkan kuisioner berbentuk

pilihan ganda dan uraian sehingga memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban sesuai yang ia inginkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi dengan validitas yang tinggi.

- 2) Diskusi dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Peneliti disini melakukan diskusi dengan teman sejawat yang memiliki penelitian yang hampir serupa.
- 3) Member check, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. (Sugiyono, 2005:275-276). Teknik membercheck ini dilakukan peneliti dimana setelah peneliti melakukan wawancara dengan ketiga informan yang peneliti ambil kemudian hasil dari wawancara tersebut peneliti melakukan transkrip di lembar yang sudah peneliti buat lalu hasil transkrip wawancara tersebut diperlihatkan oleh peneliti kepada para informan tersebut, akan terlihat apakah transkrip wawancara tersebut sesuai dengan pemaparan yang dikeluarkan oleh para informan atau tidak dan setelah para informan mengatakan sesuai lalu peneliti mengajukan tanda tangan pada form biodata informan untuk melakukan kesepakatan bahwa beliau sudah menjadi informan pada penelitian yang peneliti lakukan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Pendidikan dalam dinamika SARA

Pendidikan tidak memberi pengaruh atau dampak buruk terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA, justru dengan adanya Pendidikan dapat membantu mengurangi konflik, meningkatkan toleransi dan menghilangkan intoleransi, Pendidikan juga mempromosikan kerukunan antar suku, agama, ras, dan kelompok.

Dalam penghapusan konflik atau diskriminasi, Pendidikan dapat menghilangkan diskriminasi berdasarkan SARA dengan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan Hak Asasi Manusia kepada para pelajar. Dalam pengajaran nilai toleransi, Pendidikan dapat mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Melalui Pendidikan, individu dapat memahami persamaan dan perbedaan serta belajar untuk hidup berdampingan dengan damai. Dalam Proses pengajaran di sekolah atau universitas, guru dan dosen juga perlu menerapkan kurikulum multicultural, sekolah dapat memasukkan materi atau pelajaran yang mempromosikan pemahaman terhadap budaya dan sejarah berbagai kelompok etnis, agama, dan ras. Ini dapat membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang seringkali muncul akibat ketidaktahuan.

4.1.2 Politik dalam berbagai dinamika isu SARA

Informan 1 dalam wawancara mengatakan SARA sangat mempengaruhi politik dalam segala hal. Ia mengibaratkan politik ini dalam sebuah kasus, dalam sebuah pemilihan pimpinan politik, dimana ada dua kandidat dengan agama yang berbeda sedangkan kedua kandidat tersebut mencalonkan diri di negara atau wilayah yang nantinya sebagai pemilih itu mayoritas agamanya adalah islam, maka secara otomatis pemilih akan memilih kandidat yang sejalan atau sama dengan dia dalam hal agama. Isu-isu SARA seringkali menjadi pemicu konflik politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Persaingan politik yang sengit dapat memicu ketegangan antar-grup etnis atau agama, dan bahkan dalam beberapa kasus, berujung pada kekerasan atau kerusuhan. Hal itu merupakan salah satu kesenjangan yang di hadapi oleh Indonesia.

4.1.3. Peranan Mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA

Sebagai mahasiswa yang nantinya akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, kita harus bisa menerapkan kehidupan bertoleransi serta menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyaring informasi yang ada disekitar dengan mengetahui kebenaran berita tersebut terlebih dahulu. Karena peran mahasiswa dalam mengurangi konflik keberagaman budaya ini sangat penting. Mahasiswa memiliki ciri khas berfikir yang lebih rasional, kreatif serta inovatif dibandingkan dengan kalangan masyarakat lain. Dengan ini mahasiswa diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menangkal berbagai isu SARA yang terjadi saat ini.

Di era digital saat ini konflik SARA lebih sering terjadi melalui jejaring sosial. Contoh gampangnya yaitu banyaknya hate speech atau ujaran kebencian yang disebarkan di media sosial tanpa disertai kebenaran. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumpas kejahatan semacam itu adalah dengan membuat UU ITE untuk menjerat pelakunya. Mahasiswa dalam hal ini harus bijak dalam bermedia sosial. Segala bentuk hoax atau pun kejahatan yang bersangkutan dengan SARA, mahasiswa harus bias bijak dalam menanggapi.

4.1.4. Dampak dari adanya politik SARA di Indonesia

Menurut survei yang dilakukan Lingkar Madani Indonesia atau LIMA, efek politik uang diperkirakan hanya sekitar 30%, yang berarti dari 100 orang yang mendapat uang maka mungkin sekitar 30 saja yang memilih sesuai dengan permintaan pemberi uang. Sementara politik SARA bisa berdampak melintasi batas-batas daerah tertentu, yang terlihat saat Pilkada DKI Jakarta ketika orang-orang di luar Jakarta pun juga sampai ikut terlibat. Yang kedua soal waktu. Pilkada DKI Jakarta yang begitu marak penggunaan isu SARA, sampai sekarang terbelah. Jadi bukan hanya berbeda pilihan tapi terbelah karena isu SARA. Baik yang menang maupun yang kalah masih memiliki dampak psikologis akibat isu SARA yang diperlakukan sangat kuat. Jadi kalau dilihat dari dampaknya, ternyata politik SARA dampaknya jauh lebih dahsyat dari politik uang. Politik uang terlokalisasi hanya di daerah tempat pilkada berlangsung dan relatif berjangka pendek karena orang datang ke TPS, suaranya dibeli.

4.1.5 Hambatan dan tantangan yang dihadapi Administrasi Negara dalam menghadapi konflik SARA

Dalam upaya mengatasi konflik SARA, administrasi negara seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan atau tantangan. Beberapa dari tantangan ini melibatkan aspek kebijakan, sosial, dan politik. Hambatan dan tantangan yang saat ini dihadapi administrasi negara; *pertama*, politik identitas. Isu-isu identitas sering dimanfaatkan dalam politik untuk memperoleh dukungan politik. Politisi atau kelompok tertentu dapat memobilisasi individu-individu dengan berpegang pada identitas masing-masing, yang dapat memperkeruh konflik dan menghambat upaya penyelesaian. *Kedua*; kurangnya kepemimpinan politik. Dalam beberapa kasus, kurangnya kepemimpinan politik yang kuat dan tegas dalam mengatasi isu-isu SARA menjadi hambatan. Politisi mungkin enggan untuk mengambil tindakan yang diperlukan karena takut kehilangan dukungan politik atau dalam beberapa kasus karena mereka sendiri terlibat dalam isu-isu SARA. *Ketiga*; kurangnya perlindungan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak diatasi dengan baik oleh aparat keamanan atau lembaga pemerintah dapat memicu kemarahan dan konflik. Korban pelanggaran HAM seringkali mencari keadilan dan memperjuangkan hak mereka melalui berbagai cara, termasuk konfrontasi politik.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini akan dijelaskan dan membahas data serta informasi yang sudah diperoleh dari studi literatur, wawancara maupun kuisioner. Dapat dikatakan bahwa SARA memiliki pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Isu SARA merupakan isu yang tengah hangat dibicarakan oleh publik dan memicu berbagai konflik. Alasannya adalah karna multikulturalisme yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan juga primordialisme yang masih kuat dan melekat pada masing-masing kelompok.

Primordialisme merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang erat hal-hal yang dibawa individu sejak lahir. Baik mengenai adat istiadat, tradisi, kepercayaan, dan hal lain yang sdah ada di dalam lingkungan pertamanya. Primordialisme merupakan faktor penting yang digunakan sebagai identitas masyarakat atau golongan, Dimana identitas tersebut digunakan untuk memperkuat ikatan golongan atau kelompok sosial dalam menghadapi sebuah ancaman yang berasal dari luar. Paham inilah yang nantinya mampu meningkatkan semangat berbangsa dan

bernegara. Akan tetapi, selain ada keuntungannya, ternyata paham tersebut juga bisa memberikan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya primordialisme, dapat membangkitkan prasangka buruk dan juga bisa menyebabkan permusuhan antara satu golongan dan golongan lain yang memiliki perbedaan. Jika sikap setiap anggota masyarakat memiliki orientasi kepada kepentingan bersama atau kelompoknya, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai primordialisme. Kelompok masyarakat memiliki bermacam-macam jenis, bergantung pada proses pembentukannya. Terdapat pula kelompok sudah ada dan terbentuk karena adanya ikatan alamiah dan juga ikatan keturunan. Dimana hal tersebut telah mengikat masyarakatnya dengan sistem norma dan adat istiadat yang sejak zaman dahulu sudah tumbuh secara alami. Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang terbentuk dengan sengaja. Sehingga nilai, norma, dan aturan yang mengikat anggotanya disusun secara terbuka dan sengaja. Jenis kelompok ini seringkali disebut dengan kelompok atau grup atau *primary group*.

Dari hasil kuisioner yang diisi oleh 20 responden, sebanyak 18 responden mengatakan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan SARA masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab menguatnya politik identitas dalam politik elektoral dan bagaimana efek elektoralnya dalam dinamika kontestasi di tingkat lokal? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan pendekatan studi kasus kolektif, dengan mengambil kasus yang memiliki karakteristik dan tren yang sama, yakni Provinsi Sumbar dan Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut para sarjana, sebagaimana dikutip Herdiansah (2017), politik identitas bisa memunculkan permasalahan bahkan ancaman bagi sistem demokrasi liberal karena tiga hal berikut: pertama, sifat dari politik identitas yang cenderung lebih memberi batasan ketimbang membebaskan individu; kedua, persoalan klaim representasi dan legitimasi dalam perjuangan politik identitas yang bisa menimbulkan ambiguitas terkait kepentingan dan tujuan perjuangan politik identitas; serta ketiga, potensi dimanipulasinya politik identitas oleh elit politik untuk mencapai kepentingannya, mengingat klaim-klaim identitas seringkali dibentuk dan disalaharahkan oleh elit untuk memelihara kekuasaan dan otoritasnya dalam menghadapi potensi pertentangan baik dari dalam maupun luar kelompok. Pasca reformasi 1998, kemunculan kembali politik aliran ditandai dengan karakteristik yang berbeda, yaitu membedakan antara abangan

geertzian dan santri, politik aliran yang muncul membedakan antara pendukung secularism dan pengikut islam politik (Ufen:2006). Karakteristik ini jugalah yang kemudian disematkan dalam dinamika kontestasi pada Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Bedanya, jika pada Pemilu 1955 politik aliran mengkarakterisasi perbedaan ideologi partai, di kedua pemilu terakhir politik aliran justru turut mengkarakterisasi perbedaan diantara kedua kubu pendukung, yakni “nasionalis” versus “islamis” atau “sekularis” versus “agama”. Yang terjadi akhirnya adalah polarisasi berdasarkan pembelahan agama (Pepinsky 2019).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Administrasi negara memiliki peran yang penting dalam penanganan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Hubungan antara administrasi negara dan penanganan konflik SARA melibatkan beberapa aspek sebagai berikut; *pertama*, Penyelenggaraan Hukum dan Keamanan. Administrasi negara bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan penegakan hukum. Dalam konteks konflik SARA, aparat keamanan harus bekerja untuk mencegah dan meredakan kekerasan serta kerusuhan yang mungkin muncul akibat konflik. Administrasi negara juga harus memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam menangani konflik tersebut. *Kedua*, Pengaturan dan Regulasi. Administrasi negara dapat menerapkan peraturan dan regulasi yang mendukung penanganan konflik SARA. Ini dapat termasuk undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan SARA, serta peraturan yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antar-etnis, agama, dan kelompok. *Ketiga*, Dialog dan Mediasi. Administrasi negara dapat memfasilitasi dialog antar-kelompok yang terlibat dalam konflik SARA. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator atau mengundang pihak ketiga yang netral untuk membantu merundingkan solusi damai. *Keempat*, Pendidikan dan Kesadaran. Administrasi negara dapat mempromosikan pendidikan dan kesadaran mengenai keragaman dan hak asasi manusia. Program pendidikan yang mencakup isu-isu SARA dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman. *Kelima*, Kebijakan Publik. Administrasi negara dapat merancang kebijakan publik yang mendukung integrasi dan inklusivitas. Kebijakan-kebijakan ini bisa mencakup program-program untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta untuk mempromosikan partisipasi aktif semua kelompok dalam kehidupan politik dan sosial. *Keenam*, Pendekatan Prakonflik. Administrasi negara dapat mengadopsi pendekatan prakonflik dengan mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah eskalasi. Ini dapat termasuk pemantauan dini, mitigasi, dan upaya-upaya perdamaian.

Peran administrasi negara dalam penanganan konflik SARA adalah memfasilitasi perdamaian, menciptakan lingkungan yang mendukung kerukunan, serta mengatasi akar masalah konflik SARA. Hal ini memerlukan komitmen kuat dari

pemimpin pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga pemerintah lainnya untuk bekerja sama dalam mengatasi konflik tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat sipil, LSM, dan komunitas adalah penting untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan mempromosikan perdamaian serta toleransi dalam masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dibahas di atas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis :

1. Saran kepada peneliti selanjutnya yaitu untuk memperluas cakupan penelitian, termasuk studi mendalam pada berbagai sub topik yang terkait dengan isu SARA, seperti pengaruhnya terhadap ekonomi, Pendidikan, atau kebijakan public.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperbarui penelitian ini dengan data dan informasi yang sesuai dengan waktu penelitian, karna isu SARA dapat berkembang seiring berjalannya waktu.
3. Disarankan kepada pembaca untuk merenungkan segala hal yang dibahas dalam penelitian ini. Apa yang bias dilakukan oleh pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, dan individu untuk mengatasi konflik-konflik yang muncul terkait dengan SARA.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, J. S. (2018). *metdologi penelitian kualitatif*. sukabumi: cv jejak.
- Arya Fernandes, A. M. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. BAWASLU.
- Dra. Triyuningsih, M. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*. Doktor Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.
- Engkus. (2017). *Artikel91administrasi Publik Dalam Perspektif Ekolog*. Vol 7, No 1 (2017) .
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21. No. 1. (2021).
- Jamaluddin, J. A. (t.thn.). *Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi SARA Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023*. Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
- Kridianta Rendi. (2021). *Respon Mahasiswa Komunikasi Dan Penyiaran Islam Terhadap Penyebaran Informasi Mengandung Unsur Sara Di Media Sosial Instagram*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Masagung, H. (t.thn.). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- M Khoiruzadid Taqwa, R. P. (2019). *Analisis Perspektif Mahasiswa Dalam Menyikapi Isu SARA Menjelang Pilpres 2019*. Jurnal Analisa Sosiologi. vol.8(1): 18:34, 19.
- Muary Rholand (2020). *Laporan Penelitian Sekolah Pembauran ; Resolusi Konflik SARA di Kalangan Milenial pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Pinandita, Y. (2020). *Komunikasi Tokoh Agama Dalam Menepis Isu SARA di DesaBalun Pancasila Kabupaten Lamongan*. Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus Surabaya, v.
- R. Sigit Krisbintoro, R. C. (n.d.). *Etnis Dan Perempuan Di Aras Lokal*. Jurnal Analisis Sosial Politik. Volume 2, No 1.
- Shofa, A. M. (2016). *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016.
- Tualeka, M. W. (n.d.). *Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern*. JURNAL AL-HIKMAH, Volume, 3 Nomor, 1.
- Ulul Fathur Rofii, S. (2023). *Rasisme Dalam Cerpen Sunlie Thomas Alexander*. Bapala Volume 10, Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 29-36.

